



Bupati Pamekasan Jawab PU Tujuh Fraksi Atas Petrubahan APBD TA 2021

Pemkab Pamekasan, Bhirawa

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mendengar jawaban bupati terhadap Pemandangan Umum (PU) 7 (tujuh) Fraksi atas Perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman yang memimpin rapat memberi kesepakatan kepada Bupati Pamekasan menyampaikan jawaban, memberikan hadiah sepasang sepatu motif Batik hasil pengrajin dari pelatihan Wirausaha Mandiri (WUB).

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dalam jawabannya, di bidang pendapatan mengenai kenaikan PAD sebesar Rp56 miliar lebih karena kenaikan Pajak daerah sebesar Rp13 miliar yang didukung pajak penerangan jalan dan pajak tanah dan PBB. Kedua restribusi daerah naik sebesar Rp584 juta lebih, merupakan penda-

patan retribusi pelayanan kesehatan.

Ketiga hasil diperoleh kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp7 juta lebih, merupakan pendapatan laba yang dibagikan pemerintah daerah atas penyertaan modal di BUMD.

Keempat, lain-lain pendapatan PAD sebesar Rp. 42 miliar lebih, merupakan pendapatan dari badan layanan umum daerah. Sedang, kenaikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp11,4 miliar lebih, dari pendapatan transfer antar daerah.

Terkait penurunan pendapatan daerah di Perubahan APBD 2021, terdapat pada penurunan pendapatan transfer sesuai Permenkeu RI No: PMK 17/PMK07/2021 ttg pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa TA 2021, terdiri dari dana bagi hasil sumber daya alam minyak, turun jadi Rp1,2 miliar lebih, DAK turun Rp-26,1 miliar lebih, DAK turun menjadi Rp1,2 miliar lebih.



Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Saat membacakan jawaban atas PU Fraksi DPRD Pamekasan terhadap Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan TA 2021.

Terkait, perbedaan selisih silfa pada tahun anggaran berjalan Tahun 2021 sebesar Rp454,8 miliar lebih. Sedangkan hasil audit BPK RI pada laporan keuangan pemerintah daerah sebesar Rp313,8 miliar lebih. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp140,9 miliar lebih.

“Selisih silfa ini oleh pemerintah

kabupaten sudah diantisififikasi dengan melakukan pengurangan, bahkan pemangkasan anggaran belanja melalui sub kegiatan di masing-masing SKPD. Sehingga silfa di Perubahan APBD 2021, berdasar audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah,” jelasnya. [din]